

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan usaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spiritual. Sehingga diharapkan masa depan Negara yang lebih baik dalam proses pembangunan yang terjadi dalam penyusunan kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat agar harapan-harapan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi ditengah-tengah pembangunan dari berbagai perspektif terlihat suatu realitas dari kurang adanya pembangunan (*inderdevelopment*)¹. Pembangunan yang ada dan menunjukkan hasilnya , tetapi masih ada kemiskinan dan kesenjangan social sebagai salah satu agenda utama dalam konsep pembangunan semakin mendalam.

¹ Carolie Bryant & Louise G. White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta, 1980, hal 5

Indonesia sebagai Negara berkembang, sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari kemiskinan dan kesenjangan. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan untuk membantu orang-orang miskin yang kekurangan pangan.

Indonesia sering disebut sebagai negara agraris, sebab memang sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani dan hasil dari petani tersebut merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi masyarakat Indonesia. Tapi ada yang aneh, kelaparan dan busung lapar justru masih terjadi di sana-sini. Politik pangan, termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah menyangkut masalah pangan mungkin dapat dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Yang juga cukup parah terjadi adalah dalam urusan perberasan nasional. Meski reformasi telah lama bergulir, tapi ternyata nyaris membawa berkah bagi kaum tani. merugikan kaum tani. Hal itu dapat dicontohkan dalam Inpres no 13 tahun 2005 tentang perberasan sebagai landasan legal perberasan nasional². Harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Bahkan lebih rendah dari rata-rata harga pasar di saat panen raya sekalipun.”

Sebagai negara agraris sudah saatnya pemerintah memikirkan formula yang tepat untuk menyelamatkan petani dari keterpurukan.

Hal ini dikarenakan sektor pertanian masih menjadi pekerjaan utama atau tumpuan hidup masyarakat Indonesia. Bahkan 57,77 persen penduduk miskin

² <http://www.bulet.co.id>. Accessed Time 21.02.2008 10.00 WIB at

adalah petani dan buruh tani. Menurut WTO, Indonesia harus melakukan kebijakan beras secara hati-hati karena sebagai negara konsumen beras terbesar dunia (rata-rata 133 kg/kapita/tahun), Indonesia importir beras terbesar di dunia³. Untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan suplai beras yang cukup kepada rakyatnya.

Pangan dalam hal ini gabah atau beras masih sebagai sumber energi dan protein terbesar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Produksi beras mempekerjakan lebih banyak orang dibandingkan kegiatan lainnya. Beras sebagai sumber penghasilan utama bagi tenaga tidak terlatih dan pengeluaran untuk beras adalah terbesar dalam anggaran rumah tangga miskin. Jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan produksi beras adalah petani miskin dan bukan pemilik lahan.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan

³ ibid

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Ketahanan pangan adalah isu politik yang sensitif dan dapat membatasi kedaulatan suatu negara dari hubungan dengan pihak lain. Stabilitas politik biasanya terkait dengan kemampuan suatu negara untuk memastikan suplai beras yang cukup dengan harga wajar.

Masalah ketahanan pangan adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam menjaga ketahanan pangan sangat diperlukan suatu badan usaha yang mengatur masalah pangan. Yaitu Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk ditingkat pusat dan Dolog (Depot Logistik) untuk tingkat daerah yang mempunyai tugas utama menjaga kestabilan harga khususnya beras dan gabah ditingkat konsumen maupun produsen. Dengan peran serta Bulog maupun Dolog dalam hal pengadaan pangan dan penyalurannya di Indonesia diharapkan dapat membantu para petani di dalam menjamin tingkat harga dasar gabah yang layak sehingga tidak merugikan para petani untuk lebih

bergairah didalam meningkatkan produksi pangan. Sebab apabila produksi pangan dikuasai pihak swasta akan merugikan para petani dan akibat yang lebih buruk lagi adalah tergoncangnya perekonomian Negara kita.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini petani, tetapi hubungan antara petani dengan Bulog, tidak pernah mesra. Saat musim panen, Bulog dengan seribu satu alasan kesulitan menyerap gabah petani. Petani pun demikian, sulit mengakses gudang-gudang Bulog. Petani terpaksa menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pembelian Pemerintah (HPP). Persoalan ini kemudian bertambah parah karena pemilik penggilingan tidak memberi harga yang pantas pada gabah petani. Para pemilik penggilingan ini adalah mitra Perum Bulog yang menjadi perpanjangan tangan Bulog membeli gabah petani.

Perum Bulog Sub Divre V Kedu terkendala dalam pembelian gabah di Kabupaten Purworejo, karena petani sudah enggan menjual gabah ke Bulog. Keengganan itu merupakan bentuk kekecewaan petani setelah beberapa waktu lalu petugas maupun mitra kerja Bulog tak kunjung turun ke lapangan. Sementara, petani sudah sangat membutuhkan dana untuk keperluan tanam lagi

Wakil Kepala Bulog Sub Divre V Kedu Wasingun HS saat dikonfirmasi membenarkan adanya kendala tersebut. Ia mengakui masuknya gabah dari petani Purworejo ke Bulog memang agak seret. Menurut Wasingun, petani enggan menjual gabah ke Bulog karena harga di tengkulak jauh lebih tinggi dibandingkan HPP yang dijadikan acuan Bulog⁴.

Keengganan petani menjual ke Bulog ternyata tidak hanya sekadar selisih harga. Lebih dari itu, menurut Sudarmo, petani di Kecamatan Purwodadi mengatakan, dirinya enggan menjual gabah ke Bulog karena persyaratannya yang terlalu rumit⁵.

Peran Bulog dalam ketahanan pangan nasional perlu menggandeng masyarakat, mitra kerja Bulog dimana setelah menjadi mitra, mereka harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk masalah pengadaan di wilayah kerja mereka masing-masing dan menjaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh, dan ketahanan pangan nasional kita tercapai.

Menurut data Badan Pusat Statistik Purworejo, hasil produksi gabah Purworejo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil produksi gabah Kabupaten Purworejo pada tahun 2006 adalah 280.463 ton. Pada tahun 2007 sebesar 292.466 ton, sedangkan pada tahun 2008 produksi gabah juga mengalami peningkatan yaitu 308.469 ton. Sebagian besar hasil produksi gabah tersebut untuk konsumsi masyarakat Purworejo sendiri dan dikirim keluar daerah oleh pedagang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat diserap oleh Bulog. Meskipun tidak dalam jumlah yang besar, tetapi jumlah gabah yang masuk ke Bulog juga

⁴ <http://www.bulog.co.id> Accessed Time 02:04:2004 15:25 WIB

terjadi peningkatan setiap tahunnya. Data gabah yang diserap Bulog tahun 2006 adalah 54.500 ton, tahun 2007 sebesar 55.700 ton. Sedangkan tahun 2008 sebesar 57.000 ton.⁶ Dari data diatas dapat terlihat bahwa Bulog masih dapat menyerap gabah lebih besar lagi dari petani.

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "STRATEGI KERJASAMA PERUM BULOG SUB DEVISI REGIONAL V KEDU DENGAN MITRA KERJA BULOG PURWOREJO DALAM PENGADAAN GABAH TAHUN 2006-2008"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas akhirnya penulis merumuskan suatu rumusan masalah yaitu: "Bagaimana Strategi Kerjasama Perum Bulog Sub Devisi Regional V Kedu dengan Mitra Kerja Bulog Purworejo dalam Pengadaan Gabah tahun 2006-2008?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui strategi kerjasama antara Perum Bulog Sub Devisi Regional V Kedu dengan Mitra Kerja Bulog Purworejo dalam Pengadaan Gabah tahun 2006-2008.
2. Untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam kerjasama pemerintah dengan swasta.

⁶ ibid

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah diterima dibangku kuliah sehingga lebih mengetahui kegunaan teori tersebut guna mendapatkan pengalaman dalam praktek penelitian.
2. Bagi fakultas diharapkan dapat menambah pembendaharaan ilmiah dipergustakaan khususnya perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bagi pihak Bulog diharapkan dapat menjadi masukan agar dalam melakukan kerjasama ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, tetapi juga pihak lain yaitu masyarakat.

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk menunjang dalam pemecahan masalah penelitian diperlukan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang telah meneliti masalah-masalah yang hampir sama atau bahkan serupa agar penelitian tidak menyimpang dari sisi ilmiah dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Di dalam membahas uraian lebih lanjut mengenai rumusan masalah diatas, tentunya akan berpijak pada satu teori, dimana pengertian teori menurut Winarno Surachmad:

Teori adalah perumusan sementara tentang dalil-dalil sebagai titik permulaan dalam arti seluruh sumber hipotesa yang akan dibuktikan”⁷

Sedangkan menurut Koentjaraningrat: Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa factor tertentu dalam masyarakat⁸.

Melihat pengertian diatas, maka dapat dikatakan teori adalah suatu kemungkinan detail dari suatu permulaan atau pernyataan sebab akibat dari gejala yang diteliti. Untuk memberikan gambaran mengenai kajian yang akan diteliti dalam mengetahui kerjasama antara antara Perum Bulog Sub Devisi Regional V Kedu sebagai lembaga pemerintah non departemen dengan Mitra Kerja Bulog Purworejo dalam Pengadaan Gabah tahun 2006, peneliti akan mendasarkan pada tinjauan yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan fenomena yang akan dikaji atau diteliti adalah sebagai berikut:

Untuk mencoba menganalisis perumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori :

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis memiliki peranan yang penting bagi suatu instansi yang memiliki peranan yang penting bagi pemerintah. Bagi instansi pemerintah yang dalam hal ini Bulog Sub Devisi Regional V Kedu perencanaan strategis akan membantu dalam menentukan strategi-strategi yang tepat dalam melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam pengadaan gabah..

Olsen dan Eadie mendefinisikan perencanaan strategis sebagai :”Upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang penting yang membantu dan membantu bagaimana menjadi organisasi (atau identitas lainnya)

apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu⁹.

Sementara itu J. Salusu berpendapat bahwa perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir logis yang menerapkan dimana anda berada, kemana anda akan pergi, dan bagaimana anda bisa sampai disana. Suatu perencanaan strategis juga merupakan proses yang mengarahkan para pemimpin mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara manajemen berpikir, mengalokasikan dan merelokasikan berbagai sumber daya, sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain perencanaan berhubungan dengan masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang (*futurity of current decision*). Ia menetapkan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi dengan perubahan lingkungan dengan cara yang paling menguntungkan organisasi. Dimana perencanaan strategis meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki organisasi terhadap lingkungan eksternalnya berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) atau dengan kata lain bahwa analisis lingkungan tersebut merupakan landasan utama bagi identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan serta berbagai peluang beserta tantangan yang ada

tahap selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh isu-isu strategis yang dihadapi organisasi.

Analisis SWOT adalah upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi dengan menggunakan instruments SWOT. SWOT adalah penjelmaan dari lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki organisasi terhadap lingkungan eksternalnya berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*)¹⁰.

Selanjutnya, analisis SWOT merupakan suatu alat yang eektif dalam membantu mengidentifikasi masalah, terutama dengan pendekatan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan eksternal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat 4 unsur yang terkait dan tidak lain singkatan dari SWOT itu sendiri yang tertuang dalam matriks SWOT¹¹:

Tabel 1.1

Matriks SWOT

	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
ANCAMAN (THREATS)	Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

¹⁰ Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 19.

¹¹ I. David Hunter dan Thomas J. Wheeler, Manajemen Strategis. Andi Yogyakarta, 2000.

Menurut John M. Bryson ada delapan langkah dalam proses perencanaan strategis. Delapan langkah ini menurutnya harus mengarah kepada tindakan, hasil dan penilaian evaluatif, atau implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dengan proses dan terus menerus.

Kedelapan langkah itu adalah sebagai berikut¹² :

a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses strategis

Tujuan dari proses awal perencanaan strategis ini adalah untuk menegosiasi kesepakatan dengan pembuat keputusan kunci, baik di tingkat internal maupun pihak eksternal. Dorongan dan komitmen awal ini sangat penting bagi suatu perencanaan strategis yang sukses.

b. Mengidentifikasi berbagai mandat organisasi

Berbagai mandat baik formal maupun informal yang dibebankan kepada Bulog selama ini harus dikemukakan secara jelas dan tidak ditutup-tutupi. Secara aktual, hal ini menekankan pada bagaimana Bulog perlu mengetahui secara jelas apa yang telah dimandatkan untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bagi sebuah pemerintahan, mandat memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi mereka.

¹² John M. Bryson, *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 55-71.

c. Menjelaskan misi dan nilai-nilai organisasi

Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan (sebagai tujuan) apa (yang termasuk kebutuhan sosial atau politik) yang hendak dicapai oleh Bulog Sub Devisi Regional VKedu.

d. Analisis lingkungan internal :kekuatan dan kelemahan

Untuk mengamati kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bulog dan kemudian dapat memonitor pada kondisi sumber daya yang dimiliki, strategi yang digunakan sekarang dan kinerja.

e. Analisis lingkungan eksternal : peluang dan tantangan

Analisis terhadap lingkungan di luar organisasi atau daerah (eksternal) dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Bulog dalam mengembangkan dirinya. Jika lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang dapat dikontrol daerah, maka lingkungan eksternal tidak dapat dikontrol dan dikendalikan oleh daerah yang bersangkutan. Peluang dan tantangan dapat diamati dengan melihat keadaan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

f. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi

Berdasarkan kelima langkah sebelumnya, selanjutnya diidentifikasi berbagai permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Bulog. Suatu pernyataan mengenai permasalahan strategis harus memuat tiga elemen, yaitu metode pengungkapan yang sesingkat mungkin, penjabaran faktor-faktor penyebab permasalahan strategis

dan penentuan konsekwenseo kegagalan dalam mengatasi permasalahan strategis tersebut.

g. Merumuskan strategi untuk mengolah isu-isu

Selanjutnya merancang strategi menghadapi permasalahan srategis. Sebuah strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut: secara teknis dapat dilaksanakan, secara politik dapat diterima dan yang tidak kalah pentingnya adalah strategi tersebut harus terkait dengan permasalahan yang akan diatasi.

h. Menciptakan suatu visi yang efektif untuk masa depan

Perumusan visi yang efektif di masa yang akan datang merupakan langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis.

2. Pengertian Pemerintah

Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut:

- a. **Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas atau kewenangan atau kekuasaan Negara. Kalau kita mengikuti Montesquie pemerintahan dalam arti luas meliputi bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.**
- b. **Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan khusus dalam bidang eksekutif saja.**

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian dari pemerintahan dalam

- a. Pemerintahan dalam arti luas menunjukkan kepada aparatur Negara, alat-alat perlengkapan Negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas atau kekuasaan Negara atau pemerintah dalam arti luas.
- b. Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan kepada aparat, organ atau alat perlengkapan Negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit.

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 pasal 1. ayat 1 yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia Sedangkan menurut Mashuri sebagaimana dimaksudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah

Menurut The Liang Gie seperti dikutip Mashuri Maschab yang dimaksud pemerintahan daerah adalah:

*"Satuan-satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah"*¹⁴.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab, *pemerintahan daerah adalah: "Satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di dalam lingkungan Negara"*¹⁵.

¹⁴ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962. hal 45

¹⁵ Mashuri Maschab, *Pemerintahan Daerah Menurut UU No 5 Tahun 1974*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1982, hal 32

Bahwa pemerintahan daerah menurut UU No 34 tahun 2004, pasal 1. ayat 1 dan 2 :

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. BULOG

Bulog adalah merupakan suatu lembaga pemerintah non Departemen yang berada dibawah tanggung jawab Presiden. Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk tingkat pusat dan Depot Logistik (DOLOG) untuk tingkat daerah mempunyai tugas utama menjaga kestabilan harga khususnya beras dan gabah ditingkat konsumen dan produsen. Untuk membantu serta melengkapi tugas dari pada Bulog tersebut maka dibentuklah Bulog ditingkat Propinsi dan Sub Dolog di tingkat Kotamadya atau Kabupaten serta perwakilan atau gudang-gudang diseluruh Indonesia. Disamping sebagai stabilator harga pangan yaitu beras, gabah, gula, gandum dan bahan pokok lainnya, juga mempunyai peran dalam pengadaan pangan untuk penyediaan stock Nasional pangan dalam negeri dan juga sebagai penyalur beras untuk keluarga miskin (Raskin). Pihak Bulog dalam menstabilkan tingkat harga pangan selalu memperhatikan keadaan harga pasar

Pengadaan pangan yang dilakukan oleh Bulog dengan petani melibatkan pihak ketiga yaitu Mitra Kerja Bulog, untuk mempermudah tercapainya target pengadaan pangan dalam satu tahun. Kebijakan harga dari Bulog selalu sama dalam setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar para petani mendapat suatu jaminan yang layak tentang harga gabah atau beras sesuai dengan harga pasar yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga para petani tidak terkecoh oleh para tengkulak. Karena tengkulak biasanya akan membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi, dan ini akan mempengaruhi harga dipasaran sehingga harga menjadi semakin tinggi, yang akan menyebabkan harga barang-barang konsumen lainnya naik. Untuk menghindari hal tersebut maka dilaksanakan kebijakan makro yang merupakan salah satu fungsi Bulog. Pilihan kebijakan yang dipilih tersebut pelaksanaannya berdasarkan pada mekanisme harga yang telah dikenal yaitu:

1. Kebijakan harga yang berorientasi kepada produsen yang dikenal dengan istilah *floor price* (harga dasar) dengan tujuan untuk menjamin kepastian harga dipasar sekaligus bagi produsen atau petani agar merangsang peningkatan produksinya.
2. Kebijakan harga yang berorientasi kepada konsumen yang dikenal dengan istilah *ceiling price* (harga tertinggi) dengan tujuan untuk melindungi konsumen agar dapat membeli kebutuhan akan barang pokok yaitu beras dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat.

Mubyarto menyatakan tujuan utama dari kebijakan pertanian adalah mengusahakan stabilitas harga dan pendapatan petani antara musim yang satu dengan musim yang lain dari tahun ke tahun¹⁶.

5. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan komoditi strategi yang memiliki multi dimensi daerah, penduduk, teknologi yang sangat kuat kandungan politiknya baik nasional maupun internasional. Situasi Negara yang penuh ketidakpastian menyebabkan kurangnya perhatian pada kebijakan pada pangan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling dasar, sehingga semua orang pasti menginginkan kecukupan pangan. Karena itu pula semua bangsa pasti menginginkan mempunyai ketahanan pangan yang tinggi.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik secara ekonomi maupun secara fisik untuk mencukupi pangan buat semua warganya, dan rumah tangga tidak dalam posisi resiko kehilangan akses.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan. Oleh

¹⁶ Mubyarto, *Dasar-dasar Ekonomi Pertanian*, 1997

sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.

Ketahanan pangan merupakan hal yang amat strategis dan membutuhkan penanganan yang serius dan berkesinambungan. Ketahanan pangan menyangkut kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda.

Masalah ketahanan pangan adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

6. Kerjasama Antara Pemerintah dengan Swasta

a. Pengertian Kerjasama

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara orang perorangan atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk dan pola kerjasama dapat diumpainya pada semua kelompok

manusia. Kerjasama itu sendiri timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (in groupnya) dan kelompok lainnya (out groupnya). Kerjasama mungkin akan bertambah apabila ada bahaya luar yang mengancam atau ada tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolongan orang.

Kerjasama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas, karena keinginan-keinginan pokoknya tidak terpenuhi oleh karena adanya rintangan-rintangan yang bersumberkan dari luar kelompok itu. Keadaan tersebut dapat menjadi lebih tajam lagi apabila kelompok demikian merasa tersinggung atau dirugikan system kepercayaan atau dalam salah satu bidang sensitif dalam kebudayaan. Betapa pentingnya fungsi kerjasama digambarkan oleh Charles H Cooley sebagai berikut:

“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”¹⁷.

Jadi dapat dikatakan bahwa kerjasama terjadi karena adanya kesamaan kepentingan dan tujuan dari sekelompok orang sehingga mereka bersatu bekerjasama untuk mewujudkan tujuannya. Kerjasama sebagai salah satu interaksi

social merupakan gejala universal yang ada pada masyarakat dimanapun juga. Walaupun secara tidak sadar kerjasama tadi mungkin timbul di dalam keadaan-keadaan dimana kelompok tersebut mendapat ancaman dari luar.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama yaitu:

- (i) Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong.
- (ii) *Bergaining* yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.
- (iii) Kooptasi (*co-optation*) yaitu suatu proses penerimaan unsure baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan stabilitas dalam organisasi yang bersangkutan.
- (iv) Koalisi (*coalition*) yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi karena maksud utama adalah mencapai satu atau beberapa tujuan bersama maka sifatnya adalah kooperatif.
- (v) *Join-Ventura* yaitu kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Misalnya perhotelan, pertambangan batubara, perfilman dan sebagainya.

b. Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta

Adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta memang menjadikan adanya pembagian tanggung jawab baik dalam produksi atau dalam pelayanan

Dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan swasta terdapat pula beberapa jenis partisipasi dari pihak swasta yang secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (i) Konsep "*Built, Operate and Transfer*" (BOT), dimana swasta membangun, mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (ii) Konsep "*Divesture*" dimana fasilitas atau badan usaha pemerintah dijual kepada swasta untuk bersaing melalui tender pekerjaan (konstruksi maupun jasa) yang semula hanya diperuntukkan pemerintah.
- (iii) Konsep "*Leasing*" dimana badan usaha swasta menyewa suatu fasilitas pemerintah selama jangka waktu tertentu yang disepakati dan memperoleh pemasukan. Setelah batas waktu perjanjian, fasilitas dikembalikan kepada pemerintah.
- (iv) Konsep "*Contract Operations*" dimana pemerintah tetap mengendalikan badan usahanya dan meminta suatu kontraktor untuk memberikan jasa manajemen atau jasa-jasa lainnya selama periode tertentu. Kontraktor dibayar langsung oleh pemerintah atas jasa-jasa yang diberikannya, yang meliputi berbagai bidang yang luas, mulai dari pekerjaan konstruksi sipil, pengadaan tenaga untuk berbagai pekerjaan konstruksi sipil, pengadaan tenaga untuk berbagai pekerjaan, tanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan, penagihan retribusi, jasa konsultasi serta manajemen dan lain-lain.

(v) Penerapan konsep kerjasama pemerintah-swasta yang meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan kota baru, peremajaan kota dan pembangunan kawasan industri, dimana pemerintah membantu penyediaan lahan dan swasta merupakan pelaksana utama pembangunannya.

(vi) Akhirnya terdapat pula sector informal yang sangat penting, yang telah sangat berperan dalam penyediaan pelayanan kota secara murah. Sektor ini sering diabaikan dan tidak dapat dimasukkan secara pasti ke dalam tipe-tipe diatas¹⁸.

Dalam penelitian ini pengelolaan pengadaan gabah oleh mitra kerja Bulog di Purworejo merupakan partisipasi pihak swasta dalam kegiatan pembangunan daerah dan dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai wujud ketahanan nasional. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam penelitian ini termasuk ke dalam konsep *Contract Operations* dimana pemerintah tetap mengendalikan badan usahanya dan meminta suatu kontraktor untuk memberikan jasa manajemen atau jasa-jasa lainnya selama periode tertentu. Kontraktor dibayar langsung oleh pemerintah atas jasa-jasa yang diberikannya, yang meliputi berbagai bidang yang luas.

Suatu kerjasama pemerintah dengan swasta harus menggunakan indicator untuk mengukur keberhasilan suatu kerjasama tersebut. Indikatornya yaitu harus memiliki orientasi dan misi yang jelas. Misi dan orientasi yang jelas inilah yang akan tetap bertahan (*survive*). Casey Stengel menyatakan "*if you don't know where you're going, you might end up somewhere else*" (jika anda tidak tahu

¹⁸ Brannan, H dan Taylor, J. L. 1975: Hal 107

kemana tujuan anda, maka anda mungkin akan tersesat). Idiom ini tidak hanya relevan bagi seseorang, namun juga bagi sebuah organisasi public. Perumusan misi merupakan langkah yang penting bagi sebuah organisasi public. Dikatakan oleh Clive Holtham bahwa:

“a mission statement is potentially an immensely powerfull symbol It encapsulates precisely the reason why most peoplework in the public services.It really can represent as overriding shared value of the organization”¹⁹

Bagi organisasi yang memberikan pelayanan public, misi yang ditulis merupakan symbol yang sangat berpengaruh dan menunjukkan nilai yang hendak direalisasikan oleh organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan public. Dalam ilmu manajemen modern, misi ini memberikan arah kepada organisasi, kemana dan mengapa ia melakukan sesuatu.²⁰

E. Definisi Konsepsional

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹⁹ Clive Holtham, "Key Challenges for Public Services Delivery", dalam Leslie Willcoeks dan Jenny Harrow (peny.), *Rediscovering Publik Services Management*, McGraw-Hill BOOK Company, London, 1992, h.85-6.

²⁰ Nurmandi, Achmad, *Manajemen Pekotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Darah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Sinergi Publishing, IDN, Yogyakarta, 2006

2. Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara orang perorangan atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kerjasama itu sendiri timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (*in groupnya*) dan kelompok lainnya (*out groupnya*).

3. BULOG

Bulog adalah merupakan suatu lembaga pemerintah non Departemen yang berada dibawah tanggung jawab Presiden. Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk tingkat pusat dan Depot Logistik (DOLOG) untuk tingkat daerah mempunyai tugas utama menjaga kestabilan harga khususnya beras dan gabah ditingkat konsumen dan produsen.

F. Definisi Operasional

Indicator penentu keberhasilan merupakan faktor faktor yang sangat berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan sehingga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk menentukan indicator penentu keberhasilan dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisa lingkungan internal:

1) Kekuatan (*strength*)

a. Tersedianya mitra kerja perusahaan baik dari dalam maupun pemerintah

- b. Memiliki tugas pokok dan yang jelas di bidang ketahanan pangan..
- c. Institusi yang membidangi ketahanan pangan di kota atau pusat.
- d. Memiliki Unit Pengadaan Gabah dan Beras
- e. Terdapat Kerjasama dengan mitra kerja yang melaksanakan pengadaan gabah dan beras..

2) Kelemahan (*weakness*)

- a. Kurang tersedianya database pengadaan pangan.
- b. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan pangan.
- c. Sarana dan prasarana kurang memadai.
- d. Terbatasnya kemampuan SDM yang membidangi pengadaan pangan.
- e. Lemahnya koordinasi dan kerjasama dalam penanganan masalah pengadaan pangan..

2. Analisis lingkungan eksternal

1) Peluang (*opoortunity*)

- a. Adanya kewenangan dekonsentrasi Bidang Ketahanan pangan.
 - b. Melimpahnya hasil pertanian
 - c. Adanya kebutuhan masyarakat yaitu pedagang yang memiliki
- ...naka pengalihan padi untuk menjadi kasirama sebagai mitra

d. Tersedianya mitra kerja yang melaksanakan sebagian pengadaan pangan.

e. Terbukanya kerjasama antara Bulog dengan mitra kerja

a. Ancaman (*threats*)

a. Rendahnya harga hasil pertanian mendorong gejolak petani

b. Keengganan petani menjual hasil pertaniannya kepada Bulog

c. Persyaratan yang dianggap terlalu rumit oleh pihak petani

d. Tidak stabilnya hasil pertanian dalam tiap tahunnya

e. Krisis ekonomi yang tidak menentu

3. Isu Kerjasama

1) Daya guna pegawai Bulog untuk pencapaian pengadaan pangan dan mitra kerja Bulog. Merupakan hal yang penting,, pegawai berperan langsung dalam pengadaan pangan dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja, dan berhubungan langsung dengan mitra kerja untuk mencapai ketahanan pangan nasional

2) Upaya kelembagaan yang ada untuk memperlancar pola kemitraan. Dengan kelembagaan yang baik dalam Bulog Subdevisi Regional V Kedu maka akan ada kerjasama antara pegawai Bulog dengan Mitra kerja untuk pengadaan pangan.

3) Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lepas dari

kemiskinan. Harus tercapainya ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu hak asasi manusia

4) Strategi Kerjasama

- a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai Bulog Subdevisi Regional V Kedu
- b. Upaya kelembagaan yang ada untuk memperlancar pola kemitraan. Dengan kelembagaan yang baik dalam Bulog Subdevisi Regional V Kedu maka akan ada kerjasama antara pegawai Bulog dengan Mitra kerja untuk pengadaan pangan.
- c. Membina serta meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Mitra Kerja Bulog

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini lebih banyak bertitik tolak pada paradigma fenomenologis yang obyektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau sekelompok komunitas tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut²¹. Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami suatu situasi tertentu.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proses pengadaan gabah. Berdasarkan tujuan

tersebut maka penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data, sehingga diperoleh gambaran tentang kerjasama yang sudah dilakukan. Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian deskriptif ini dikatakan oleh Mely G. Tan sebagai berikut:

“Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah hipotesa-hipotesa mungkin juga belum tergantung sedikit banyak pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan”²².

Sedangkan menurut Winarno Surachmad:

“ Penelitian yang deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penyelidikan yang demikian, metode penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang menyangkut pemecahan berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, tehnik interview, observasi, studi kasus, studi komperatif atau studi operasional. Tidak mengherankan jika mudah timbul selang surup pengertian atau kekaburan batas istilah tersebut”²³.

Penelitian ini dapat juga diwujudkan sebagai usaha pemecahan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menilai gejala, menerapkan standard an menetapkan hubungan antar gejala-gejala.

Dengan demikian ciri pokok metode deskriptif adalah:

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan factor-faktor tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

²² Tan.M.G, 1981:Hal 42

²³ Surachmad. W, 1978: Hal 131

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Perum Bulog Sub Dolog Divisi Regional Wilayah V Kedu. Adapun alasannya karena Bulog atau Dolog yang merupakan Lembaga Non Departemen secara tidak langsung ikut andil dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan nasional dengan salah satu kebijakan pelaksanaan pengadaan gabah. Pemilihan penelitian di wilayah Kedu karena Kedu membawahi Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kotamadya Magelang yang merupakan daerah subur penghasil padi. Dan lokasinya dapat terjangkau karena masih satu daerah.

3. Jenis Data

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka dibutuhkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dari penelitian ini dikelompokkan menjadi:

(i) Data Primer

Data primer adalah data utama yang menyangkut pendapat dari informasi tentang variabel penelitian, dimana bisa diperoleh dari jawaban hasil wawancara.

(ii) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumentasi tentang daerah penelitian, misalnya mengenai keadaan geografi, ~~dan lain-lain~~

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun data tersebut dapat diperoleh dengan cara:

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian ini, metode observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan cara pengamatan dan pencatatan secara runtut dan sistematis terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Sehingga bisa memperkaya dan memperkuat data yang dibutuhkan.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode interview ini antara peneliti dan koresponden bertatap muka mengajukan pertanyaan dan mencatat keterangan yang dikemukakan oleh koresponden. Wawancara dilakukan kepada aparat Sub Dolog Wilayah V Kedu yang menangani program pengadaan pangan dalam negeri. Sementara itu guna mendapatkan data primer yang lebih dalam dan luas, penyusun juga menghimpun informasi dari beberapa sumber lain termasuk para rekanan kontraktor (mitra kerja) yang bekerjasama dengan Sub Dolog Wilayah V Kedu dalam program pengadaan pangan dalam negeri.

c. Dokumentasi

Dengan tehnik dokumentasi, penyusun melakukan penelusuran dokumen,

terutama berupa buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

berkaitan dengan masalah yang diteliti, surat kabar, internet, serta laporan hasil penelitian yang terkait.

5. Unit Analisis

Unit analisis atau obyek dari penelitian ini adalah unit yang akan diteliti atau dianalisa, untuk itu dalam penelitian ini unit analisisnya adalah:

- a. Staf dan karyawan yang berada di Perum Bulog Sub Devisi Regional V Kedu
- b. Mitra Kerja Bulog Purworejo seperti pedagang beras yang memiliki ijin usaha.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar²⁴.

Analisis data berdasarkan hasil sintesis pendapat dari Patton, Bogdan dan Taylor dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data²⁵. Sementara itu Sofyan Effendi dan Chris Manning menyebut analisis data sebagai penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²⁶. Tehnik analisa data yang digunakan adalah analisa data digambarkan dengan kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk

²⁴ Y. M. Effendi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, Hal

memperoleh kesimpulan. Maka dalam kaitannya dengan penelitian ini analisa data dapat dirinci dalam langkah-langkah berikut ini;

- a. **Peringkasan data yaitu meringkas data yang relevan dengan focus penelitian kemudian menyederhanakan dan akhirnya mengambil inti dari data tersebut.**
- b. **Mengklasifikasikan data yang diperoleh menjadi stuan-satuan informasi yang lebih berarti.**
- c. **Menterjemahkan satuan-satuan informasi tersebut, kemudian melakukan penarikan kesimpulan.**
- d. **Menarik abstraksi berdasarkan kesimpulan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menyusun hipotesis seperti yang disarankan data**